

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI TEKNOLOGI, INOVASI, DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Author

Suwandi¹, Selvi Diana Meilinda²

Email:

32.0953@praja.ipdn.ac.id, selvi@ipdn.ac.id

Affiliasi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Received :

Revised :

Accepted :

Available Online:

Corresponding author

Suwandi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: 32.0953@praja.ipdn.ac.id

Abstrak

Belum optimalnya sistem informasi dan teknologi untuk menyusun dan memonitor perencanaan, serta kurangnya inovasi dan program pemberdayaan sosial oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Lampung Tengah yang diindikasikan akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* menarik perhatian penulis untuk memberikan gagasan mengenai potensi pengembangan teknologi, inovasi, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat kepada Bappeda Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Bappeda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis potensi, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan menggunakan studi kepustakaan dan analisis deskriptif sumber data berupa dokumen yang terkait dengan fokus penelitian dianalisis secara kritis dan mendalam sehingga memperoleh jawaban yang komprehensif berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Kabupaten Lampung Tengah memiliki 15 isu strategis dan 6 masalah yang dimiliki oleh Bappeda Lampung Tengah. Gagasan penulis terhadap potensi pengembangan teknologi, inovasi, dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan upaya kolaboratif berbagai stakeholder sehingga seluruh proses pengembangan teknologi, inovasi, dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Harapannya kompleksitas masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan seluruh potensi sumber daya di Lampung Tengah dengan dukungan melalui beberapa program kegiatan yang memiliki tujuan untuk mencapai Pembangunan berkelanjutan provinsi Lampung 2030.

Kata Kunci: Ekonomi, Inovasi, Pemberdayaan Masyarakat; Teknologi,

ABSTRACT

The suboptimal use of information and technology systems for planning and monitoring, along with the lack of innovation and social empowerment programs by the Development Planning Agency at the Sub-National Level (Bappeda) of Central Lampung Regency, is indicated to potentially hinder the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). This issue has drawn the author's attention to propose ideas regarding the potential development of technology, innovation, and socio-economic empowerment to Bappeda of Central Lampung Regency. This study aims to explain the role of Bappeda in supporting sustainable development based on the potential, technology, innovation, and socio-economic empowerment of the community in Central Lampung Regency. By employing literature studies and descriptive analysis, document-based data relevant to the research focus were critically and thoroughly analyzed to obtain comprehensive answers to the research questions. The results indicate that Central Lampung Regency faces 15 strategic issues and six

significant problems within Bappeda. The author suggests that the development of technology, innovation, and socio-economic empowerment can be achieved through collaborative efforts involving various stakeholders, ensuring that all processes are well-executed. It is hoped that the complexity of these problems can be addressed by maximizing the resources available in Central Lampung with support through several program initiatives aimed at achieving the sustainable development goals of Lampung Province by 2030.

Keywords: *Economy, Innovation, Community Empowerment, Technology*

PENDAHULUAN

Program pembangunan berkelanjutan atau (*Sustainable Development Goals (SDGs)*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang dimulai pada tahun 2016 hingga 2030. *SDGs* mempunyai 4 pilar utama yaitu pertama, pilar pembangunan sosial yaitu tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kedua yaitu pilar pembangunan ekonomi, *SDGs* adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Selanjutnya ketiga yaitu pilar pembangunan lingkungan, *SDGs* adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Keempat yaitu pilar pembangunan hukum dan tata Kelola, *SDGs* adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata Kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Dalam pelaksanaannya seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia menjalankan program pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia pelaksanaan *SDGs* dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengatur pelaksanaan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam Perpres tersebut diuraikan 17 tujuan dari implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) di Indonesia maka diperlukan penyelerasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Tindak lanjut dari RPJPN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dimulai dari 2015-2019 dan dilanjutkan di tahun 2020-2024, yang merupakan hasil terjemahan NAWACITA Presiden Jokowi Dodo. Singkatnya RPJMN adalah rancangan dan menjadi pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden yang didalamnya memuat mulai dari pembacaan kondisi negara sampai dengan rumusan strategi pembangunan nasional dalam segala aspek dan sekaligus agar pembangunan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025. Karena keselarasannya dan dianggap akan menjadi bagian koheren dan terintegrasi dalam agenda pembangunan paska 2015 kemudian *SDGs* menjadi bagian dari RPJMN (RPJMN 2015-2019). Dalam pelaksanaan pada Pemerintah Daerah, *SDGs* akan

diselaraskan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai pedoman yang akan dijadikan landasan dalam pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Dengan demikian pemerintah daerah harus menyiapkan dukungan kebijakan, regulasi, anggaran dan program; Pemetaan dan integrasi target dan indikator TPB/*SDGs* nasional ke dalam RPJMD; Peningkatan kapasitas Pemda dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan *SDGS*/TPB; Sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi kepada seluruh masyarakat dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah penyiapan data dan informasi. Penyusunan indikator nasional untuk *SDGs* dilakukan dengan koordinasi terpusat oleh Bappenas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data nasional. Penyusunan indikator nasional dilakukan melalui proses diskusi dan konsultasi publik dengan berbagai pihak, diantaranya kementerian/lembaga terkait, kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, serta pelaku bisnis dan usaha.

Salah satu daerah di Indonesia yang berfokus untuk melaksanakan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu Kabupaten Lampung Tengah, melalui Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) yang sangat berperan sentral dalam kesuksesan *SDGs* di Lampung Tengah. Berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) Bappeda yaitu Menyusun dan melaksanakan serta memonitor pelaksanaan rencana Pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan tupoksi tersebut tentunya Bappeda harus memerhatikan segala potensi dan masalah yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah.

Bappeda Lampung Tengah bukan merupakan organisasi yang tidak memiliki masalah, berdasarkan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat 6 masalah dan 15 isu strategis yang dimiliki oleh Bappeda Lampung Tengah. Dari analisa penulis terdapat pengekerucutan masalah dan isu strategis di Bappeda Lampung Tengah yaitu belum optimalnya sistem informasi dan teknologi untuk menyusun dan memonitor perencanaan, belum optimalnya program pemanfaatan Desa/Kampung untuk membangun daerah, belum optimalnya pemberdayaan entrepreneurship untuk menjamin pengembangan sosial ekonomi masyarakat serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan program Bappeda di Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan analisis masalah dan isu strategis tersebut maka, dibutuhkan inovasi untuk menselaraskan seluruh program kegiatan dalam satu rencana aksi yang dimotori oleh Bappeda Lampung Tengah, Oleh karena itu penulis ingin menganalisis potensi pengembangan Teknologi, Inovasi, dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah melalui tugas dan fungsi dari Bappeda Lampung Tengah. Penulis menyadari bahwa kompleksnya permasalahan di Kabupaten Lampung Tengah seperti kemiskinan, kesejahteraan sosial, luas wilayah, keadaan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama tetapi disamping itu potensi sumber daya alam, penguatan regulasi dari pimpinan daerah dan seluruh potensi serta peluang memberikan optimisme terhadap kesuksesan potensi penerapan Teknologi, Inovasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah yang diinisiasi oleh Bappeda Lampung Tengah. Meskipun terkesan sulit tetapi harapannya potensi penerapan tersebut akan memberikan dampak dan pengaruh yang

signifikan terhadap penyelesaian masalah internal Bappeda serta mendekatkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 Provinsi Lampung. Maka berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini akan membahas bagaimana pembangunan berkelanjutan berbasis potensi, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Bappeda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis potensi, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

Metode

Penelitian ini mengguna metode Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti serta sumber informasi dan referensi hasil penelitian dengan tujuan untuk memperoleh jawaban mengenai masalah yang akan diteliti (Yaniawati, 2020). Dalam penelitian ini sumber dokumen berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan dokumen kesiapan Kesiapan Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung menuju tujuan pembangunan berkelanjutan provinsi Lampung serta dokumen dan artikel terkait yang mendukung penelitian. Selanjutnya dalam proses analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Bahan Pustaka yang didapat akan dianalisis secara kritis dan mendalam yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

A. Hasil

Potensi pengembangan teknologi, inovasi, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui tugas dan fungsi Bappeda Lampung Tengah merupakan salah satu alternatif penyelesaian permasalahan kompleks yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam proses penyelesaian permasalahan daerah khususnya yang dilakukan oleh Bappeda, terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu :

a) Faktor internal

- 1) Kuantitas dan kualitas aparatur yang baik.

Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022, Bappeda Lampung Tengah mempunyai kuantitas personal berjumlah 59 orang dengan 44 PNS, dan 15 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Dalam menilai kualitas aparatur Bappeda Lampung Tengah, apabila merujuk pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat ditinjau dari tingkat Pendidikan, pangkat golongan, diklat, dan struktural. Pada Bappeda Kabupaten Lampung Tengah jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki yaitu sebanyak 59 orang. Dengan berbagai macam kualifikasi pendidikan, mulai dari Strata II berjumlah 17 orang; Strata I berjumlah 18 orang; Diploma III berjumlah 5 orang;

SLTA/Sederajat berjumlah 18 orang; dan SLTP/Sederajat berjumlah 1 orang. Dalam pelaksanaan proses pengembangan daerah berbasis teknologi, inovasi, dan pemberdayaan sosial ekonomi diperlukan kuantitas aparatur sipil negara dengan pendidikan yang berkualitas. Untuk mengukur kualitas aparatur sipil negara yang berkualitas salah satunya yaitu dengan tingkat kualifikasi pendidikan (Nurfatimah et al., 2022).

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Bappeda Kabupaten Lampung Tengah memiliki jenjang jabatan yang diatur berdasarkan Pangkat dan Golongan. Pangkat dan Golongan di Bappeda Lampung Tengah dimulai dari Pembina Utama Muda/IV.c (1 orang); Pembina Tingkat I/IV.b (2 orang); Pembina/IV.a (6 orang); Penata Tingkat I/ III.d (12 orang); Penata/III.c (5 orang); Penata Muda Tingkat I/III.b (5 orang); Penata Muda / III.a (5 orang); Pengatur Tingkat I/ II.d (5 orang); Pengatur / II.c (5 orang); Tenaga Kerja Sukarela (TKS) (15 orang) sehingga total seluruh pegawai berjumlah 59 orang. Dari seluruh pegawai di Bappeda Lampung Tengah terdapat 30 orang yang melaksanakan peningkatan kualitas pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Adapun Diklat yang dilaksanakan yaitu Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) dengan rincian Diklat Pim Tingkat III dilaksanakan oleh 5 pegawai dan Diklat Pim Tingkat IV dilaksanakan oleh 25 pegawai. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Diklat Pim memainkan peran krusial dalam pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai termasuk pada pegawai Bappeda Kabupaten Lampung Tengah (Warni & Syaifuddin, 2017).

2) Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor yang memadai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Lampung Tengah serta selain diperlukan sumber daya manusia atau pegawai, diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Berdasarkan LAKIP Bappeda Lampung Tengah diketahui bahwa jumlah sarana dan prasarana penunjang berjumlah 403 item dengan rincian 1 kantor, 4 kendaraan dinas roda empat, 9 kendaraan dinas roda dua, dan 389 Sarana Kantor Lainnya (Meja, Kursi, Kursi Tamu, Filing Kabinet, Almari, Laptop, Komputer, Printer, Scanner, LCD, Layar OHP, Digitizer, Kulkas, Televisi, Notebook, AC, Kipas Angin, Aipon Ruangan, Sound System Aula, Kamera, Handyacamp, Peta Administrasi Kabupaten, Jam Dinding.

3) Anggaran dan Realisasi

Untuk menunjang melaksanakan seluruh program dan kegiatan, selain kualitas dan kuantitas pegawai dan sarana serta prasarana penunjang diperlukan anggaran yang memadai. Dalam LAKIP Bappeda Lampung Tengah, pagu anggaran untuk tahun 2022 berjumlah Rp.12.521.873.567 dan realisasi Rp.11.640.299.887.

b) Faktor eksternal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda Lampung Tengah tidak terlepas dari pengaruh lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh serta dapat mendukung terhadap pelaksanaan tugas. Hal ini mengingat bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak lain sehingga koordinasi dan kerja sama yang baik dari pihak-pihak terkait

diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas Bappeda. Adapun factor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Bappeda Lampung Tengah yaitu:

- [1] Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung
- [2] Kebijakan Bupati Lampung Tengah, sebagai pemegang kebijakan pemerintahan dan Pembangunan
- [3] Dukungan DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai wadah konsultasi dan mitra pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan tingkat daerah
- [4] Dukungan organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten lampung tengah dan instansi vertikal
- [5] Koordinasi yang baik antar organisasi perangkat daerah dan pejabat yang tergabung dalam Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lampung Tengah
- [6] Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Kampung
- [7] Dukungan Perguruan tinggi, Lembaga swadaya Masyarakat, ataupun Lembaga lain yang berkompeten
- [8] Partisipasi Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, serta Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang secara garis besar pelayanan yang diberikan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan Pembangunan daerah. Pelayanan dibidang perencanaan Pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Fungsi lain dari Bappeda adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala perangkat daerah apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi serta ke kewenangannya.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 4 aspek pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu :

a) Aspek Politik

Artinya dalam perencanaan Pembangunan yang baik dan sesuai rencana akan terwujud dengan apabila terdapat aspek politik yang terlibat salah satunya yaitu komunikasi politik (Hairunnisa & Syaka, 2022). Peran politik terhadap Pembangunan juga berlaku secara nasional, dimana Pembangunan tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan Masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu keterlibatan

politik yang dapat melihat seluruh permasalahan dari berbagai sudut pandang penyelesaian (Anita Trisiana, 2019).

b) Teknokratis

Aspek teknokratis dalam perencanaan pembangunan mempunyai peran vital karena idealnya, program-program Pembangunan normatifnya harus berpihak kepada rakyat kecil, proses perencanaan tersebut dipadukan dengan perencanaan teknokratis, melalui teknokrat seperti analisis kebijakan, dosen, *Thinkthank*, serta pihak lain yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan melalui sudut pandang teknokrat (Franky Djafar & Rifka S. Akibu, 2023).

c) Partisipatif

Konsep partisipatif dalam perencanaan Pembangunan dapat dimaknai sebagai proses pelaksanaan konsep demokrasi yang melibatkan Masyarakat dalam proses merancang Pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, pandangan ini menunjukkan bahwa konsep demokrasi juga terlibat dalam konsep Pembangunan nasional. Dalam proses Pembangunan, Masyarakat tidak semata-mata diperlukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan actor dalam pelaksanaan pembangunan (Fitriani et al., 2018). Program Pembangunan yang berdasarkan partisipasi Masyarakat bersumber dari tuntutan dan kebutuhan Masyarakat yang menginginkan program Pembangunan dapat mensejahterakan masyarakat. Tetapi dalam praktiknya partisipasi Masyarakat masih terkendala yang diakibatkan oleh factor internal (dari dalam diri Masyarakat) dan factor eksternal (luar diri Masyarakat). (Rahman, 2016)

d) Atas bawah (*Top-Down*) dan Bawah atas (*Bottom-up*)

Perpaduan antara kebijakan yang dibuat dengan model *top-down* dan *Bottom-up* merupakan cara yang dapat digunakan untuk memaknai proses Pembangunan secara massif dengan mempertimbangkan kesesuaian antara apa yang dibutuhkan rakyat dengan yang ingin dikerjakan oleh pemerintah. Keterlibatan Masyarakat dalam memadukan model *top-down* dan *Bottom-up* juga digunakkan untuk merancang program atau kebijakan Pembangunan pemerintah pusat dan daerah dapat diterima oleh seluruh karangan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Haliim, 2020).

Dalam pelaksanaan tugas Bappeda Lampung Tengah memiliki tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan OPD, berikut merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Bappeda Lampung Tengah:

Tabel 1.
Tantangan dan Peluang Bappeda Lampung Tengah

No.	Tantangan	Peluang
1.	Kualitas dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan	Adanya kewenangan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

2.	Belum optimalnya kesadaran OPD dalam menyampaikan informasi dan data yang lengkap dan akurat serta tepat waktu mengakibatkan perencanaan yang disusun kurang optimal	Dukungan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah sebagai pemegang kebijakan pembangunan di daerah
3.	Dokumen perencanaan yang telah disusun belum digunakan sebagai acuan secara optimal	Dukungan Dinas/ Instansi baik vertikal maupun horizontal
4.	Belum optimalnya pengelolaan website sebagai media untuk menyebarkan informasi hasil-hasil pembangunan, karena terbatasnya sumber informasi serta keterbatasan SDM yang mampu mengelola website secara profesional	Dukungan perguruan tinggi, LSM ataupun lembaga lain yang berkompeten.
5.	Intervensi pihak-pihak tertentu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Dukungan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah
6.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya akses data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi
7.	Belum selarasnya perencanaan antar sector, antar bidang dan antar wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	
8.	Ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada pemerintah pusat	
9.	Ketidakstabilan perekonomian nasional	
10.	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah.	

Faktor-faktor diatas merupakan tantangan dan peluang yang menghambat serta mendukung pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah. Faktor eksternal selain dapat menghambat proses pelayanan juga dapat menghambat proses perencanaan penganggaran sehingga proses pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terhambat (Yunita & Ananda, 2014).

Dalam melaksanakan tugasnya Bappeda Lampung Tengah menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat pencapaian kinerjanya. Permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsi pelayanan Bappeda (Bappeda Lampung Tengah, 2021) berikut merupakan pengelompokan permasalahannya :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah ASN yang belum sesuai dengan kebutuhan dan hasil Analisa jabatan yang seharusnya 82 ASN baru tercapai 44 ASN
- b. ASN Bappeda Lampung Tengah memiliki latar belakang Pendidikan yang kurang mumpuni terhadap bidang Bappeda yaitu perencanaan dan cabang utama dalam tugas-tugas Bappeda
- c. Masih terdapat ASN yang belum disiplin dalam kehadiran dan pelaksanaan tugas-tugas

- d. Padatnya tugas teknis Bappeda sehingga ASN Bappeda kurang memiliki waktu untuk meningkatkan wawasan tentang peraturan tata cara penyusunan dokumen perencanaan yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan

2. Aspek Penguatan Jaringan dan Koordinasi Perencanaan

- a. ASN Bappeda belum sepenuhnya memiliki pemahaman tentang tahapan dan tata cara dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas.
- b. Koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan sektor swasta sebagai mitra pemerintah belum optimal, seperti halnya dalam sinergi pelaksanaan CSR antara swasta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

3. Aspek Pengembangan data, informasi dan teknologi untuk perencanaan

- a. Bappeda sebagai lembaga koordinasi belum sepenuhnya menggunakan system informasi yang dapat memudahkan dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas, seperti aplikasi dalam penyusunan perencanaan tahunan, pengumpulan data dan informasi dari SKPD, evaluasi pelaksanaan rencana dan sinergi perencanaan dengan Propinsi.
- b. Pengelolaan Website Bappeda sebagai media untuk mempublikasikan kinerja dan hasil-hasil pelaksanaan tugas Bappeda, serta menjangkau aspirasi dari masyarakat dirasakan belum optimal
- c. Kegiatan kompilasi dan publikasi data masih dilakukan oleh masing-masing bidang, sehingga belum ada suatu output publikasi data yang terpadu dan menyeluruh, sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.
- d. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data serta informasi pembangunan yang akurat dan akuntabel.

4. Aspek sarana dan prasarana pendukung

- a. Ketersediaan peralatan kerja berupa personal komputer, laptop, printer, kamera dan lainnya sudah cukup tersedia namun dengan tingginya intensitas tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang mendesak, maka kondisi sarana dan prasarana harus terpelihara agar mampu mendukung intensitas kerja yang cukup tinggi.

5. Aspek penyusunan dan pengembangan Dokumen Perencanaan

- a. Hingga saat ini mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah masih belum memanfaatkan Aplikasi (e-Planning) dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara optimal, karena belum seluruh elemen yang terkait dengan Aplikasi memahami alur kerja dari sistem yang dibangun oleh Kemendagri.
- b. Pelaksanaan pembangunan di daerah tidak hanya berasal dari dana APBD kabupaten Lampung Tengah saja. Tetapi juga dari dana APBD propinsi dan dari dana APBN dan Investasi swasta. Maka untuk lebih mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lampung

Tengah Perlu disusun dokumen-dokumen perencanaan yang mendukung atau melengkapi RPJMD.

- c. Masih terbatasnya kajian strategis, analisis dan strategi lapangan yang terkini dalam mendukung proses perencanaan dan penentuann kebijakan pembangunan daerah.
- d. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan.

6. Aspek Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi Pembangunan

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
- b. Belum optimalnya hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi sebagai bahan referensi (feedback) dalam proses perencanaan

Selain permasalahan Bappeda, Kabupaten Lampung Tengah juga mempunyai isu strategis yang harus diselesaikan oleh Bappeda selaku instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, berikut merupakan isu strtagis Kabupaten Lampung Tengah yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 (Lakip Bappeda, 2022) :

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan daerah
2. Kualitas SDM aparatur perencana belum memadai
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
4. Data dan informasi untuk menyusun perencanaan pembangunan masih kurang lengkap dan akurat
5. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah.
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian/ pengkajian untuk mendukung perencanaan pembangunan.
7. Dokumen perencanaan yang telah disusun belum optimal digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lanjutan.
8. Belum selarasnya perencanaan antar sektor, antar bidang dan antar wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
9. Belum tersedianya kebijakan-kebijakan dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang
10. Intervensi pihak-pihak tertentu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
11. Belum optimalnya pengendalian pembangunan daerah
12. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah
13. Kurang optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
14. Ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada pemerintah pusat
15. Ketidakstabilan perekonomian nasional.

Pengaruh permasalahan dan isu strategis yang terjadi di Bappeda Lampung Tengah Khususnya dan Kabupaten Lampung Tengah secara umum, dikhawatirkan apabila tidak diatasi maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembangunan

berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Lampung Tengah. SDGs secara umum diadopsi oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015, sejak saat itu pemerintah Indonesia secara aktif memasikan pengadopsian SDGs ke tingkat nasional dan daerah secara menyeluruh.

Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), mengamanatkan bahwa pencapaian TPB di daerah harus selaras dengan target dan indikator TPB dengan rencana pembangunan daerah.

Hasil laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam berdasarkan 48 indikator SDGs, Kabupaten Lampung Tengah dinilai cukup siap dalam pencapaian SDGs 2030. Dengan menggunakan metode *Scorecard*, Kabupaten Lampung Tengah memperoleh skor 3,13 atau nilai C, angka ini sedikit lebih tinggi dari skor rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang bernilai 2,99 (Satriatna & Unpad Press, 2018). Walaupun prediksi UNDP, Kabupaten Lampung Tengah dinilai cukup siap dalam pencapaian SDGs 2030 tetapi apabila tidak diikuti oleh proses perencanaan daerah yang baik maka hal tersebut akan sulit untuk direalisasikan (Mulyana & Arfayan, 2021). Selain itu 48 indikator SDGs, tidak mencantumkan kesiapan pemerintah sebagai perencana dan pelaksana kegiatan SDGs.

B. Pembahasan

Masifnya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah penulis menyadari bahwa Bappeda mempunyai peran sentral dalam menyelesaikan daerah. Selain itu peran Bappeda juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah (Fadila et al., 2021). Hasil Analisa penulis bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki kompleksitas permasalahan daerah yang terlihat dari ancaman dan permasalahan yang menghambat kinerja Bappeda. Kompleksitas permasalahan tersebut penulis kerucutkan menjadi beberapa pokok permasalahan yaitu, pertama belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi Bappeda Lampung Tengah yang berakibat pada kurangnya kualitas dokumen perencanaan daerah, dan penyusunan perencanaan pembangunan masih kurang lengkap dan akurat; kedua belum optimalnya pemanfaatan Desa/Kampung sebagai basis Pembangunan daerah yang berakibat pada belum optimalnya pengendalian Pembangunan daerah serta kurangnya kesadaran Masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan daerah; ketiga belum optimalnya pemberdayaan *entrepreneurship* untuk menjamin pengembangan sosial ekonomi Masyarakat yang berakibat pada ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada pemerintah pusat; dan terakhir belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan program Bappeda yang berakibat pada belum selarasnya perencanaan antar sektor, antar bidang, dan antar wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan; serta kurangnya koordinasi perencanaan Pembangunan antara wilayah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Maka untuk menghadapi rangkaian kompleksitas permasalahan tersebut dibutuhkan inovasi dari Bappeda selaku instansi sentral dalam proses perencanaan dan utamanya sebagai koordinator instansi lainnya dalam pembangunan daerah (Dewi & Zakia, 2022). Inisiasi penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan melihat potensi pengembangan Teknologi, Inovasi, serta Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat melalui pendekatan ekonomi berkelanjutan (SDGs) yang didasarkan pada tata Kelola kolaboratif pemerintahan. Melalui insiasi program unntuk melihat potensi pengembangan Teknologi, Inovasi serta Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat

diharapkan dapat menyelesaikan seluruh sumber masalah pembangunan daerah Lampung Tengah, serta dapat memberikan daya ungkit daerah serta mensukseskan pembangunan berkelanjutan melalui sumber ekonomi Masyarakat. Berikut merupakan uraian program potensi pengembangan teknologi, inovasi dan pemberdayaan social ekonomi Masyarakat:

1) Teknologi

Berdasarkan pada masalah dan isu strategis pada Bappeda Kabupaten Lampung Tengah diketahui bahwa dari kurangnya pemanfaatan teknologi pada Bappeda memberikan dampak yang sangat besar terhadap dokumen perencanaan daerah seperti kualitas dokumen daerah yang belum memadai dan data serta informasi untuk menyusun Pembangunan masih kurang lengkap dan akurat. Keseluruhan hal tersebut akan memberikan dampak negative terhadap proses perencanaan dan Pembangunan daerah sehingga akan menghambat proses pencapaian Pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu optimalisasi pemanfaatan teknologi di Bappeda dapat menjadi solusi dari masalah tersebut. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Bappeda bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan basis data potensi wilayah yang kemudian akan dimasukkan kedalam Bank Data Potensi wilayah pada *Website* Bappeda Lampung Tengah.

Pemanfaatan dan optimalisasi sistem informasi yang dimiliki oleh Bappeda Lampung Tengah dapat digunakan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi PNS atau PPPK di Bappeda atau pun melalui *Open Reqrutment* petugas khusus yang mempunyai kualifikasi pendidikan Teknologi Informasi serta peningkatan kualitas sistem informasi seperti *Web* Bappeda Lampung Tengah diperlukan untuk menjamin keberlangsungan data yang baik.

Dalam rangka memudahkan implementasi program dan mensukseskan program penulis membuat indikator keberhasilan program yang harus di penuhi disetiap kegiatannya, yaitu :

- a) Masing-masing *stakeholder* mengidentifikasi seluruh potensi wilayah yang dimiliki baik itu pemerintahan Desa/Kampung sampai kecamatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di Kabupaten Lampung Tengah
- b) Proses sinkronisasi data antar stakeholder yang dilakukan dengan baik serta
- c) Proses kolaborasi data dengan melakukan *input* dan *up date* secara berkala di sistem informasi milik bappeda.

Indikator keberhasilan tersebut harus sejalan dengan peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas *website* Bappeda Lampung Tengah.

2) Inovasi

Untuk memaksimalkan potensi wilayah maka diperlukan gagasan dan program untuk memanfaatkan data potensi wilayah yang sudah di bangun oleh Bappeda. Gagasan dan program yang dibangun harus dimulai dari Pembangunan Desa/Kampung karena merupakan unit yang paling dekat dengan masyarakat. Harapannya dengan pembangunan dari desa/kampung akan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan pengendalian pembangunan daerah serta mampu menghimpun seluruh aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan daerah.

Program inovasi tersebut dapat dioptimalkan dengan memberikan kesempatan kepada Desa/Kampung untuk membuat inovasi tersendiri sesuai dengan kualitas, kuantitas, serta potensi sumber daya yang dimiliki. Potensi keberhasilan dari program ini dapat tercermin dari beberapa daerah yang berhasil dalam membuat konsep serupa seperti Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan Program 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 1 Inovasi, yang sukses membuat Kota Singkawang Raih Peringkat Pertama Kota Sangat Inovatif se-Indonesia (Rizki Kurnia, 2021). Selain itu Provinsi Jawa Barat dengan program Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) yang memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan daerah dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan daerah di provinsi Jawa Barat dengan efektif dan efisien (BP2D Jawa Barat, 2023).

Dengan memanfaatkan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui pendanaan APBN yang diberikan melalui dana transfer ke daerah yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Muhaimin, 2020).

Pemda Lampung Tengah melalui konsep program yang memberikan kesempatan kepada Desa/Kampung untuk membuat inovasi tersendiri sesuai dengan kualitas, kuantitas, serta potensi sumber daya yang dimiliki diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan peningkatan ekonomi pada desa yang akan dirasakan secara masif oleh masyarakat. Program tersebut dapat dimuat dalam 1 regulasi yaitu peraturan daerah atau intruksi kepala daerah sehingga payung hukum dalam menjalankan program dapat jelas dan terarah.

3) Pemberdayaan sosial ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan kolaborasi. Tujuan utama dari kolaborasi ini yaitu untuk melakukan program pembangunan berkelanjutan. Proses kolaborasi selain dari internal pemerintah juga dapat melibatkan pihak eksternal seperti perusahaan swasta untuk mendukung program kegiatan (Karina Oktriastra, 2020). Jumlah perusahaan di Lampung Tengah mencapai 63 perusahaan yang masuk dalam daftar survei Dinas Tenaga Kerja Lampung Tengah dan memberikan dampak terhadap jumlah tenaga kerja berjumlah 2.270 orang (BPS Lampung tengah, 2022)

Banyak perusahaan apabila di dimanfaatkan akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat lampung tengah sendiri. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan Pengembangan Masyarakat Entrepreneurship Melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Tujuan dari pengembangan masyarakat entrepreneurship melalui CSR ini merupakan suatu langkah yang dapat diambil Bappeda Lampung Tengah untuk dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan teknis mengenai kewiraswastaan yang diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap pengembangan sosial ekonomi masyarakat serta berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan pusat untuk pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat.

Fungsi CSR adalah untuk melaksanakan tugas membantu dalam proses tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dalam konsep Public Relations CSR akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan sosial yang akan

berdampak pada peningkatan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmadani et al., 2019)

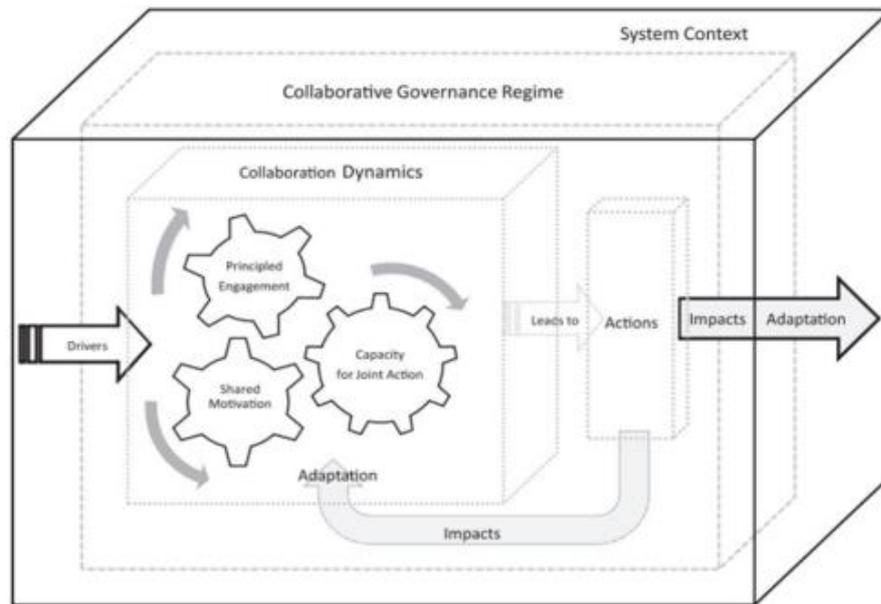
Dana CSR bisa digunakan untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat serta perlindungan lainnya terkhusus daerah lingkup perusahaan/industri berada. Untuk menginisiasikan CSR dapat menggunakan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk memberikan kekuatan hukum tetap dan lebih terarah sesuai dengan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah.

Langkah yang dapat diambil oleh Bappeda sebagai koordinator perencanaan yaitu merekomendasikan kepada dinas terkait yaitu untuk membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan Dinas Terkait misalnya dinas tenaga kerja. Pendanaan dari CSR dapat diberikan kepada balai latihan kerja milik daerah atau swasta yang digunakan untuk peningkatan kualitas masyarakat menuju kualitas masyarakat *entrepreneurship* yang baik. Dengan program ini dapat memberikan sebuah pembangunan berkelanjutan terutama pada aspek pengembangan masyarakat.

Keseluruhan potensi pengembangan tersebut akan optimal jika dibarengi dengan strategi tata kelola pemerintahan kolaboratif. Oleh karena permasalahan Bappeda Lampung Tengah sangat kompleks yang menyentuh dan berdampak terhadap seluruh elemen masyarakat maka strategi tata kelola pemerintahan kolaboratif merupakan instrument kunci dalam menyelesaikan masalah serta untuk mensukseskan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tata kelola kolaboratif merupakan serangkaian proses dan struktur dari pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan pihak-pihak secara konstruktif dengan melintasi batasan lembaga-lembaga pemerintah, tingkatan pemerintahan dan ataupun pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan publik yang tidak bisa dituntaskan (Untag, 2020).

Adopsi yang penulis lakukan dalam tulisan ini yaitu konsep tata kelola pemerintahan dari Kirk Emerson dkk. Kerangka kerja integratif pada tata kelola kolaboratif emerson dkk termuat menjadi 3 dimensi yaitu konteks sistem, penggerak dan rezim kolaboratif (Emerson et al., 2012). Berikut merupakan gambar kerangka tata kelola kolaboratif emerson dkk :



Gambar 1. Kerangka Tata Kelola Kolaboratif Emerson, Nabatchi & Balogh

Berdasarkan analisa penulis berdasarkan data yang dikumpulkan penulis dapat membedah seluruh dimensi tata kelola kolaboratif. Model diagnostik tata kelola kolaboratif emerson dkk akan menjelaskan hasil pembenahan tersebut :

Tabel 2.
Model diagnostik tata kelola kolaboratif Emerson, Nabatchi & Balogh

System Context	Drivers	Rezim Kolaboratif					
		Dinamika Kolaborasi					
		Prinsip keterlibatan					

1. Masalah pemanfaatan teknologi inovasi 2. Masalah Daya ungkit ekonomi 3. Pembangunan berkelanjutan 4. Kurangnya Sinergitas stakeholder	1. Masyarakat 2. Pemerintah 3. Swasta/Korporasi		Motivasi bersama	Kapabilitas Untuk melakukan aksi bersama	Hasil pelaksanaan kolaborasi	Umpan balik pelaksanaan kolaborasi	adaptasi
---	---	--	------------------	--	------------------------------	------------------------------------	----------

Sumber : Diolah Peneliti 2023 (Adopsi Model Diagnostik Emerson, Nabatchi & Balogh)

Dari model diagnosis tersebut dijelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif yaitu *System Context* dan *drivers* yang akan berkolaborasi dengan membangun siklus yang disertakan dengan komunikasi baik, motivasi bersama (*shared motivation*), kapasitas untuk melakukan tindakan serta hasil yang akan di evaluasi melalui umpan balik serta adaptasi program (Susanti & Juwono, 2019).

Dinamika yang terjadi dalam *system context* merupakan situasi kompleks yang dapat ditinjau dari sisi aparatur pemerintahan. Kurangnya sumber daya manusia yang berakibat pada kurangnya pemahaman dalam pemanfaatan teknologi pada Bappeda yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap dokumen perencanaan daerah seperti kualitas dokumen daerah yang belum memadai dan data serta informasi untuk menyusun Pembangunan masih kurang lengkap dan akurat. Selain itu dari sisi ekonomi dapat dilihat pada isu strategis daya ketergantungan pembiayaan dari pusat untuk daerah merupakan permasalahan akibat lemahnya daya ungkit ekonomi Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan program yang dapat menjadi pendongkrak ekonomi sehingga ketergantungan pembiayaan antara pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selanjutnya apabila ditinjau dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki untuk mendorong dan menjadi penunjang untuk mencapai prospek akhir pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

Pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan aktor yang menjadi penggerak (*Drivers*) untuk mensukseskan capaian pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Berkaitan dengan pemerintah, pemerintah sendiri memiliki sumber daya berupa, SDM, APBN, APBD, APBDes, dan kebijakan oleh karena itu dalam inisiasi potensi pengembangan teknologi, Inovasi, dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat pihak Pemerintah dalam hal ini Bappeda memiliki peran sentral dalam mengelola potensi daerah untuk perencanaan pengembangan daerah, selain itu Bappeda memiliki *website* yang dapat

dijadikan basis data penyimpanan data sehingga dapat mensukseskan program pada potensi pengembangan teknologi.

Sedangkan masyarakat mempunyai sumber daya berupa aspirasi, SDM. Aspirasi dapat dikelola untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah. Aspirasi dari penduduk desa dapat mensukseskan program Inovasi yaitu dengan memberikan kesempatan kepada Desa/Kampung untuk membuat inovasi tersendiri sesuai dengan kualitas, kuantitas, serta potensi sumber daya yang dimiliki. Selain itu masyarakat merupakan subjek utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Marlina, 2019).

Terakhir yaitu keterlibatan swasta, dalam proses pengembangan sosial ekonomi masyarakat dapat melibatkan pihak swasta untuk memberikan sumbangsih berupa dana atau program bantuan pengembangan sehingga dapat mensukseskan program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yaitu Pengembangan Masyarakat *Entrepreneurship* Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Keseluruhan uraian tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Lampung Tengah dan memberikan daya dukung terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan Provinsi Lampung khususnya mendukung Kabupaten Lampung Tengah menuju pembangunan berkelanjutan tahun 2030.

Kesimpulan

Potensi pengembangan teknologi, inovasi dan pemberdayaan social ekonomi Masyarakat dapat berjalan dengan baik ketika seluruh aparat pemerinatahan, baik itu Bappeda, Desa/Kampung, dan masyarakat serta perusahaan dapat bekerja sama dengan baik untuk mensukseskan program tersebut. Proses pengembangan teknologi, inovasi dan pemberdayaan social ekonomi masyarakat dijalankan dengan profesional, data-data yang dihimpun oleh seluruh stakeholder merupakan data kongkrit bukan merupakan data fiktif sehingga tujuan utama dari perencanaan Pembangunan daerah dapat tercapai. Selain itu CSR Perusahaan harus dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan solusi dan kesepakatan bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Harapannya kompleksitas masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan seluruh potensi sumber daya di Lampung Tengah dengan dukungan melalui beberapa program kegiatan yang memiliki tujuan untuk mencapai Pembangunan berkelanjutan provinsi lampung 2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Trisiana, D. A. R. D. S. &. (2019). Peran Pembangunan Politik Terhadap Pembangunan Nasional. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1). <https://doi.org/10.33061/glc.v5i1.2545>
- Bappeda Lampung Tengah. (2021). *Renstra bappeda kab. lampung tengah*.
- BP2D Jawa Barat. (2023). *Kompetisi Inovasi Jawa Barat*. Kijb.Jabarprov.Go.Id. <https://kijb.jabarprov.go.id/>
- BPS Lampung tengah. (2022). *Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka 2022*. BPS. <https://lampungtengahkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NWQ0MDBhZGJkODEyYmI2MmU1ZWVINTQx&xzmn=aHR0cHM6Ly9sYW1wdW5ndGVuZ2Foa2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvb8yMDIyLzAyLzI1LzVkNDAwYWWRiZDgxMmJiNjJlNWVlZTU0MS9rYWJ1cGF0ZW4tbGFtcHVuZy10ZW5nYWgtZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMi5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMy0xMS0xMiAxMDo1MjowMw%3D%3D>

- Dewi, M., & Zakia, Z. (2022). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat. *Tameh: Journal of Civil Engineering*, 11(2), 62–73. <https://doi.org/10.37598/tameh.v11i2.235>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fadila, O. A., Mahrizal, & Khalijah, S. (2021). Efektivitas peran bappeda dalam pembangunan kota medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 7(2).
- Fitriani, E., Selinaswati, S., & Mardhiah, D. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekowisata Sungai Pinang. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2). <https://doi.org/10.24036/scs.v4i2.17>
- Franky Djafar, & Rifka S. Akibu. (2023). Relasi Nilai Politik, Proses Teknokratis, dan Partisipatif dalam Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat Kota pada Arena Perencanaan dan Penganggaran. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7). <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3834>
- Hairunnisa, H., & Syaka, W. A. (2022). Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.8193>
- Haliim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1). <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>
- Karina Oktriastra. (2020). Strategi Pengembangan Dan Implementasi Smart City Pemerintah Kota Pontianak. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5). <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i5.74>
- Lakip Bappeda. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)*.
- Marlina, N. (2019). Kemandirian masyarakat desa wisata dalam perspektif community based tourism: Studi kasus Desa Ketengger, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1). <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4735>
- Muhaimin, M. (2020). Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.557-572>
- Mulyana, M., & Arfayan, M. P. S. (2021). Efektivitas Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1). <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.2019>
- Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183>
- Rahmadani, R., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Fungsi Corporate social responsibility (CSR) Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Share : Social Work Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20081>
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(1), 189–199. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1788>
- Rizki Kurnia. (2021). *Kota Singkawang Raih Peringkat Pertama Kota Sangat Inovatif Se-Indonesia*. <https://pontianak.tribunnews.com/2021/12/29/kota-singkawang-raih-peringkat-pertama-kota-sangat-inovatif-se-indonesia>
- Satriatna, B., & Unpad Press. (2018). *Kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Lampung* (Cetakan 1). Unpad Press.

- Susanti, S. O., & Juwono, V. (2019). Collaborative Governance : Proyek Penyelenggaraan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring di Indonesia Tahun 2016-2019. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1). <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.12-23.2019>
- Untag, A. (2020). *Apa itu Collaborative governance* ????. Publik.Untag-Sby.Ac.Id.
- Warni, Dedy Takdir Syaifuddin, E. S. (2017). pengaruh pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat-Pim) terhadap kompetensi dan pengembangan karir aparatur sipil negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Organisasi*, 1(1).
- Yunita, R. N., & Ananda, F. (2014). Uji Komparative Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. *Buletin Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 139-163.